

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH INSIDA

Asep Kusnadi^{1*}, Daden Fikruzzaman²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida, Indonesia

² Universitas Islam Depok, Indonesia

*email: asep.kusnadi@stit-insida.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Democratic Values; Civics Education; Problem Based Learning.

Democratic values in higher education can be implemented through various means, such as participatory, interactive, and collaborative learning, applying the principles of deliberation and mutual respect within organizations, active involvement in student activities, and increasing democratic literacy through effective civics education. All of this is intended to shape students who are critical, possess integrity, and are responsible for their social and national lives. The purpose of this research, regarding the implementation of democratic values in civics courses at universities in general and specifically at the Insida Islamic Education College, encompasses both academic and practical aspects essential for developing students as responsible and character-based citizens. The research data was collected from daily observations of teaching civics courses and interviews with several students who have or are currently taking the course.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Nilai-nilai Demokrasi; Pendidikan Kewarganegaraan; Pembelajaran Berbasis Masalah.

Nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, pembelajaran yang partisipatif, interaktif dan kolaboratif, dengan menerapkan prinsip musyawarah dan saling menghargai dalam organisasi, keterlibatan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, dan meningkatkan literasi demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Semua ini dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi umumnya dan secara khusus di sekolah tinggi ilmu tarbiyah insida mencakup aspek akademis dan praktis yang esensial bagi pengembangan mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Data penelitian

diambil berdasarkan hasil observasi keseharian dalam mengajar kuliah pendidikan kewarganegaraan dan hasil wawancara kepada beberapa mahasiswa yang sudah dan sedang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan tersebut.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, mulai dari kandungan (*prenatal*) sampai beranjak dewasa, tua hingga manusia masuk liang lahat (*minal mahdi ilal lahd*). Pendidikan yang diterima oleh manusia tentunya mengalami proses lama, mulai menerima pendidikan dari orang tua, masyarakat atau lingkungan dan sekolah baik formal maupun informal.

Manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang, karena itu manusia ingin mencapai suatu kehidupan yang optimal, yakni mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak.. Selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam meningkatkan dan mengembangkan kepribadiannya serta mampu mengembangkan keterampilan dan menggali potensinya masing-masing. Maka secara sadar atau tidak sadar, selama itulah pendidikan masih terus berjalan . Hal ini sesuai dengan amanat Undang- undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 bahwa penyelenggaraan Pendidikan wajib memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna. Selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui mengembangkan budaya membaca (*reading culture*), menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Demokrasi adalah salah satu bentuk mekanisme system pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat. Semua rakyat atau dalam hal ini warga, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Demokrasi mengizinkan setiap orang untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan serta pembuatan hukum Penguatan nilai-nilai demokrasi dalam perkuliahan di perguruan tinggi sangat

penting karena mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang kritis, toleran, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang majemuk. Di lain pihak kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan di sekolah-sekolah terkandung makna sosialisasi, diseminasi, dan aktualiasasi konsep, sistem, budaya, serta praktik demokrasi dan keadaban. Penerapan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat (Chamin, dkk, 2006:15-16). Nilai-nilai demokrasi pancasila tentu saja menjadi salah satu objek kajian di perguruan tinggi, khususnya oleh mahasiswa yang menempuh studi di program studi pendidikan agama Islam, pendidikan Islam anak usia dini dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang dibuka di sekolah tinggi ilmu tarbiyah insida. Perkuliahan di semua jenjang program studi tersebut mata kuliah pendidikan kewarganegaraan menjadi mata kuliah wajib, dan dalam perkuliahan selain membicarakan nilai demokrasi juga tentang nilai hukum, nilai Pancasila, hak-kewajiban warga negara, dan masih banyak lagi. Kajian dari hal-hal tersebut diberikan secara rinci dengan harapan dapat diterima mahasiswa sebagai agen perubahan yang kelak membawa kebaikan bagi masyarakat.

Perguruan tinggi adalah lingkungan yang beragam. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan mahasiswa untuk menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, dan latar belakang budaya, serta meminimalisir diskriminasi dan konflik. Pendidikan demokrasi mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menganalisis masalah sosial dan politik secara mendalam, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang salah.

Penyelesaian Konflik Secara Damai: Demokrasi menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, alih-alih menggunakan kekerasan. Melalui partisipasi dalam proses demokrasi di kampus (seperti pemilihan ketua organisasi mahasiswa atau forum diskusi), mahasiswa belajar mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, memupuk rasa tanggung jawab terhadap keputusan bersama, dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang aktif di masa depan.

Meningkatkan Kualitas Masyarakat, lulusan perguruan tinggi yang memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian juga Perguruan tinggi berperan sebagai benteng moral dan intelektual dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, dimulai dari lingkungan akademik hingga kehidupan sosial yang lebih luas.

Dari semua hal tersebut penguatan nilai-nilai ini dapat dilakukan melalui integrasi dalam kurikulum, penyediaan ruang bebas berpendapat, optimalisasi peran organisasi mahasiswa, dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan politik yang sehat.

Sebagai masukan bagi dosen dan institusi pendidikan, maka kedepan dipandang perlu melakukan perubahan kearah yang inovatif baik dilakukan secara daring maupun luring untuk memperbanyak pelatihan, utamanya untuk para dosen yang diarahkan pada kemampuan mensinergikan dengan perkembangan industry 4.0. Kemudian peserta didiknya terutama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diarahkan pada model berbagai penelitian (*research*) yang ada disekitar lingkungannya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah tinggi ilmu tarbiyah insida tahun akademik 2025/2026 pada saat berlangsung mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan kepada mahasiswa semester satu (ganjil). Metode penelitian yang umum digunakan untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi dalam perkuliahan di perguruan tinggi biasanya melibatkan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya, sering kali dalam bentuk penelitian tindakan (*action research*) atau penelitian deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian pendekatan kualitatif ini penulis mencoba menggunakan hasil observasi keseharian pada saat menyampaikan perkuliahan di kelas maupun luar kelas. Selain itu juga penulis dalam pengambilan data berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa mahasiswa yang sudah dan sedang berjalan dalam mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan pada semester ganji tahun akademik 2025/2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soekanto (dalam Winarno, 2006:69) nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai tidak hanya tampak pada sebagai nilai bagi seseorang saja, melainkan bagi segala umat manusia. Nilai tampil sebagai suatu yang patut dikerjakan dan dilaksanakan oleh semua orang, karena itu, nilai dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, “*demos*” berarti rakyat dan “*kratos/kratein*” berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (*government of rule by the people*). Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun demikian penerapan demokrasi diberbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sesuai dengan ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara (Kaelan, 2016: 63). Menurut Joseph A. Schmeter yang dikutip oleh Dede Rosyada ((2003: 110), demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Selanjutnya model karakteristik kuliah *pendidikan kewarganegaraan* berbeda dengan disiplin ilmu lain. Mata kuliah *pendidikan kewarganegaraan* merupakan mata kuliah yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Hasan (2006:47), pola pembelajaran mata kuliah *pendidikan kewarganegaraan* menekankan pada unsur pendidikan dan pembekalan pada mahasiswa. Penekanan pembelajarannya bukan sebatas pada upaya mendoktrin mahasiswa dengan sejumlah konsep yang bersifat hafalan belaka, melainkan terletak pada upaya agar mahasiswa mampu menjadikan apa yang telah dipelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat lingkungannya. Oleh sebab itu, Pendidikan Kewargaan (*pendidikan kewarganegaraan*) disetiap sekolah tinggi harus lebih membumi, dan mahasiswa diarahkan untuk senantiasa berpikir kritis dan objektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dimasyarakat.

Dalam kehidupan dunia pendidikan seperti sekarang ini yang disertai dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin kompleks menuntut dosen untuk dapat mengarahkan dan memotivasi mahasiswa dalam kegiatan yang melibatkan mereka untuk bertindak secara demokratis dengan menciptakan proses belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan inovatif, sesuai dengan konsep pendidikan merdeka belajar. Misalnya dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, diskusi, dan mengadu gagasan. Bahkan sebagaimana disampaikan Sonny Y. Soeharso (2022), para dosen yang mengajarkan materi ilmu social seperti pendidikan kewarganegaraan, Pancasila,

sejarah dan lainnya harus mampu mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar peserta didik tidak jenuh, misalnya bisa dikembangkan dengan model *project based learning (PBL)*, dimana mahasiswa dilatih kearah yang bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitar, seperti membuat pelatihan daur ulang sampah, terlibat dalam aksi tanggap darurat kolaborasi dengan BNPB daerahnya, pelatihan yang lebih kepada menghasilkan karya , bhakti sosial dan lainnya. Demikian pula keterlibatan langsung mahasiswa dalam *story telling*; membuat iklan *meme* sebagai ajakan kampanye gerakan anti korupsi, gerakan anti narkoba yang di share melalui media sosial (*twiter, instagram, facebook, dll*); *live in* atau *home stay* di pedesaan dengan kolaborasi bersama masyarakat sekitar sambil menggali berbagai budaya kearifan lokal yang bisa memotivasi masyarakat untuk bangkit; inklusi sosial yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kerjasama dengan UMKM setempat. Dengan demikian mahasiswa dapat termotivasi untuk merealisasikan kehidupan yang demokratis di lingkungan perguruan tinggi dan mahasiswa mampu menerapkan konsep teori yang sudah dipelajari didalam kelas yang kemudian diimplementasikan langsung di tengah masyarakat.

Implementasi berbasis problem based learning dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan kepada mahasiswa baik di dalam maupun diluar kelas, penulis menyajikan simulasi untuk memecahkan masalah untuk dikajian secara kritis oleh para mahasiswa tersebut. Implementasi *problem-based learning (PBL)* dalam pembelajaran PKn melibatkan beberapa tahap yang berpusat pada pemecahan masalah oleh mahasiswa, seperti orientasi masalah, pengorganisasian siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta evaluasi. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan penerapan nilai-nilai demokrasi pencasila dalam pembelajaran Pkn di kampus insida diwujudkan melalui metode pembelajaran aktif, kolaboratif yang berpusa pada mahasiswa dan penanaman nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan akademik da non akademik.

Adapun langkah-langkah yang dikembangkan dalam pembelajaran PKn berbasis problem based learning dimana dosen merancang RPS (rencana pembelajaran semester berbasis OBE), yang selanjutnya dari berbagai materi yang sudah disiapkan, diberikan kepada mahasiswa yang sudah dikelompokan dengan pembagian kelompok sesuai kebutuhan. Dalam persiapan diskusi tersebut dosen menggunakan berbagai metode seperti diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Selanjutnya perkuliahan dirancang berporos pada mahasiswa, di mana mahasiswa didorong

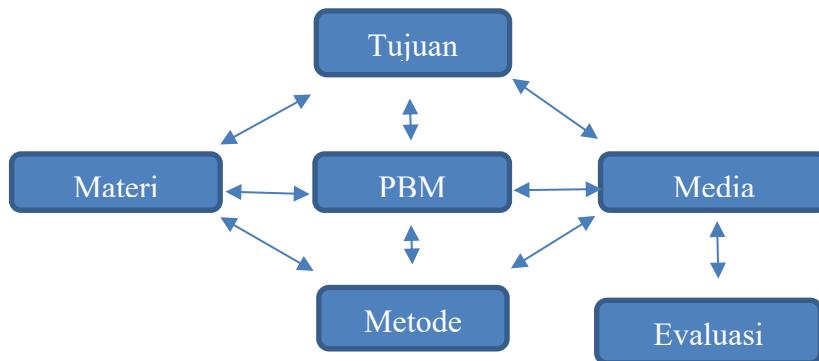
untuk mencari dan mempresentasikan 75% materi yang akan dibahas, sementara dosen bertindak sebagai fasilitator dan pendamping. Dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendiskusikan peristiwa-peristiwa lokal, nasional, dan internasional secara bebas dan terbuka, yang mencakup kajian konsep universal seperti HAM, demokrasi, dan sistem politik Indonesia.

Formulasi dalam kegiatan diskusi tentunya dosen memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan, meskipun pelaksanaannya perlu terus didorong agar semua mahasiswa aktif berpartisipasi. Selanjutnya masing-masing pertanyaan dari mahasiswa dikumpulkan dahulu oleh moderator untuk selanjutnya harus dijawab oleh kelompok pemakalah, dan dalam menjawab pertanyaan tersebut pemakalah harus menjawab sesuai konteks pertanyaan berdasarkan teori dan analisis para ahli.

Dari hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa semester satu (ganjil) tahun akademik 2025/2026, menyampaikan bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang disampaikan oleh dosen tersebut sangat menarik dan penuh inspiratif sekaligus membuka wawasan para mahasiswa lainnya, sehingga mahasiswa banyak mendapatkan informasi baru yang selama ini belum didapatkan. Disamping itu pula dalam diskusi kelompok kami banyak diajarkan bagaimana memberikan umpan balik dalam berpendapat dan juga kebebasan menyampaikan saran dan masukan sekaligus saling kritik tanpa hujatan., sehingga pelajaran PKn berbasis based learning mahasiswa diarahkan untuk bersama sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi diskusi dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah metode yang efektif untuk melatih siswa berpikir kritis, logis, dan inovatif dalam menemukan solusi untuk permasalahan sosial dan kewarganegaraan. Proses ini mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mufakat sebagai landasan dalam memecahkan masalah bersama.

Komentar mahasiswa dalam diskusi PKn berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) umumnya mencakup aspek positif dan tantangan, dengan fokus pada pengalaman mereka dalam memecahkan masalah dunia nyata, berpikir kritis, dan kolaborasi. Metode ini melatih cara berpikir kritis saya." Mahasiswa merasa kemampuan analisis dan berpikir kritis mereka terasah karena dituntut untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan menemukan solusi yang logis. Kami belajar berkolaborasi dan menghargai pendapat teman." Kerja kelompok

dalam PBL mendorong keterampilan kolaborasi dan komunikasi, serta sikap saling menghargai pandangan yang berbeda.



Kontek diskusi dalam kuliah pendidikan kewarganegaraan berbasis problem based learning merujuk pada metode enam topi berpikir (*Six Thinking Hats*) yang dipadukan dengan sintak problem based learning. (1). Topi Putih (Fakta): Fokus pada data dan fakta objektif yang tersedia terkait masalah PKn (contoh: data pelanggaran lalu lintas, pasal UUD yang relevan). (2). Topi Merah (Perasaan): Fokus pada emosi, intuisi, dan perasaan subyektif terhadap masalah tersebut (contoh: perasaan ketidakadilan, empati terhadap korban). (3).Topi Hitam (Kritik/Risiko): Fokus pada aspek negatif, kelemahan, risiko, atau mengapa suatu solusi mungkin tidak berhasil (contoh: hambatan penerapan kebijakan baru). (4). Topi Kuning (Positif/Manfaat): Fokus pada aspek positif, manfaat, peluang, dan nilai-nilai yang bisa diperoleh dari suatu solusi (contoh: manfaat hidup rukun, keuntungan dari keadilan). (5). Topi Hijau (Kreatif/Solusi): Fokus pada ide-ide baru, solusi kreatif, dan alternatif pemecahan masalah (contoh: usulan inovatif untuk meningkatkan kesadaran hukum). (6). Topi Biru (Proses/Manajemen): Fokus pada kontrol proses diskusi, memastikan aturan main, tujuan, dan langkah-langkah PBL diikuti (peran fasilitator/moderator. Metode ini dirancang untuk mendorong agar mahasiswa berpikir kritis, rasional, kreatif dan kolaboratif.

Tahapan Diskusi (Sintaks PBL)	Peran Topi	Deskripsi Peran dalam Diskusi PKn
Orientasi Mahasiswa pada Masalah	Putih	Mengidentifikasi data dan fakta objektif terkait masalah sosial/hukum yang diberikan guru

Membimbing Penyelidikan	Merah, Hitam, Kuning, Hijau	Mengeksplorasi perasaan, risiko, manfaat, dan solusi kreatif terhadap masalah tersebut.
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil	Hijau	Merumuskan solusi inovatif untuk masalah tersebut

Selanjutnya implementasi nilai-nilai demokrasi pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di luar perkuliahan (Kegiatan Kampus) yang sudah berjalan setiap tahun akademik (pelaksanaan setiap bulan Januari) yaitu kegiatan pemilihan pengurus badan eksekutif mahasiswa dengan masa jabatan satu tahun dan hal ini secara simultan terus dilakukan pergantian struktur, hal ini dimaksudkan menjadi pembelajaran berorganisasi bagi mahasiswa yaitu dilakukan dengan cara musyawarah, pemilihan pengurus, dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kedaulatan mahasiswa. Komentar mahasiswa mengenai pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di luar perkuliahan cenderung beragam, tetapi umumnya menyoroti pentingnya penerapan konsep dalam kehidupan nyata.

Penerapan konsep nyata, banyak mahasiswa merasa bahwa kegiatan di luar kelas, seperti diskusi kasus di masyarakat atau proyek sosial, membantu mereka melihat relevansi PKn dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai teori di buku ajar. Selanjutnya untuk meningkatkan Keterlibatan dan Minat: Pembelajaran yang melibatkan aktivitas langsung di luar kelas sering dianggap lebih menarik dan mengurangi rasa bosan dibandingkan metode ceramah di kelas, sehingga meningkatkan minat belajar. Demikian pula sebagai pengembangan karakter, mahasiswa mengapresiasi kesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter, seperti kepedulian sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) melalui kegiatan di luar kampus, yang berkontribusi pada pengembangan kepribadian mereka sebagai warga negara yang baik. Dan komentar lainnya dari mahasiswa adalah dalam upaya penguatan wawasan kebangsaan yang lebih luas, dimana dengan aktivitas lapangan membuka wawasan mahasiswa tentang realitas sosial, politik, dan hukum di Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme dan pemahaman komprehensif tentang ketahanan nasional.

Selanjutnya sebagai penerapan nilai-nilai demokrasi pancasila, diterapkan dalam organisasi mahasiswa (BEM) misalnya dari hasil musyawarah dan hasil

rapat kerja pengurus badan eksekutif mahasiswa dilaksanakan kegiatan seperti seminar kebangsaan dan Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa (LDKM), hal ini menjadi sarana untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi pancasila dan kepemimpinan. Disamping pula keterlibatan mahasiswa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan riil masyarakat melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) atau PPL, yang juga melatih penerapan nilai-nilai demokrasi pancasila di lingkungan sosial.

KESIMPULAN

Nilai-nilai demokrasi pancasila yang ditanamkan melalui pembelajaran *pendidikan kewarganegaraan* berbasis problem based learning akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mampu aktualisasi diri secara demokratis melalui ragam metode yang kreatif, kolaboratif dan inovatif. Adapun metode tersebut antara lain melalui diskusi kelompok, penugasan kelompok, presentasi kelompok, project based learning, small research, home stay atau living in, seminar dan lainnya. Metode pembelajaran tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa disamping untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi, persiapan kegiatan yang disampaikan oleh dosen. Maka disitu dosen akan mendapatkan kesempatan untuk mengajarkan pada mahasiswa untuk bersikap demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Said Hamid. *Pengembangan Model Pembelajaran PKn*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kharisma Putra, 2007.
- _____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICC UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Soeharso, Sonny Y. *Nilai-nilai yang Bersumber dari Pancasila*, Jakarta: Lemhanas, 2022.
- Sumadi. *Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Lemhanas, 2022.
- Winarno, Dwi. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.